BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Blue And Green' or 'Blue-Green' Network Planning berusaha untuk melindungi nilai hidrologi dan ekologi lanskap perkotaan dan lanskap lainnya, untuk memberikan langkah-langkah yang tangguh untuk mengatasi ancaman dan degradasi lingkungan. Lebih khusus lagi, '*blue-green networks*' terdiri dari elemen '*blue*' berbasis air, biasanya terdiri dari sungai, aliran, saluran air hujan, saluran irigasi, kanal, lahan basah, badan air tawar, dan sengkedan, elemen '*green*' berbasis vegetasi hijau, teknologi 'hijau' dan infrastruktur rendah karbon dan tahan iklim. Komponen '*blue*' biasanya meliputi: pohon pinggir jalan, zona rekreasi, taman bermain, taman, hutan, jalur hijau dan riparian. (Rowe and Hee, 2019).

Banyak istilah dalam Konsep Blue-Green di berbagai studi literature dan masih sedikit penelitian yang membahas konsep tersebut. Berdasarkan hasil analisa peneliti, bahwa ada 3 (tiga) konteks dominasi penyebutan konsep Blue-Green, yaitu *Blue-Green Infrastructure (BGI), Blue-Green Network Planning, serta Blue-Green Spatial Framework.* Setelah peneliti melakukan peninjauan, didapatkan hasil struktur dari Konsep Blue-Green. Untuk lebih jelasnya terkait Konsep Blue-Green disajikan dalam bentuk **diagram** sebagai berikut.

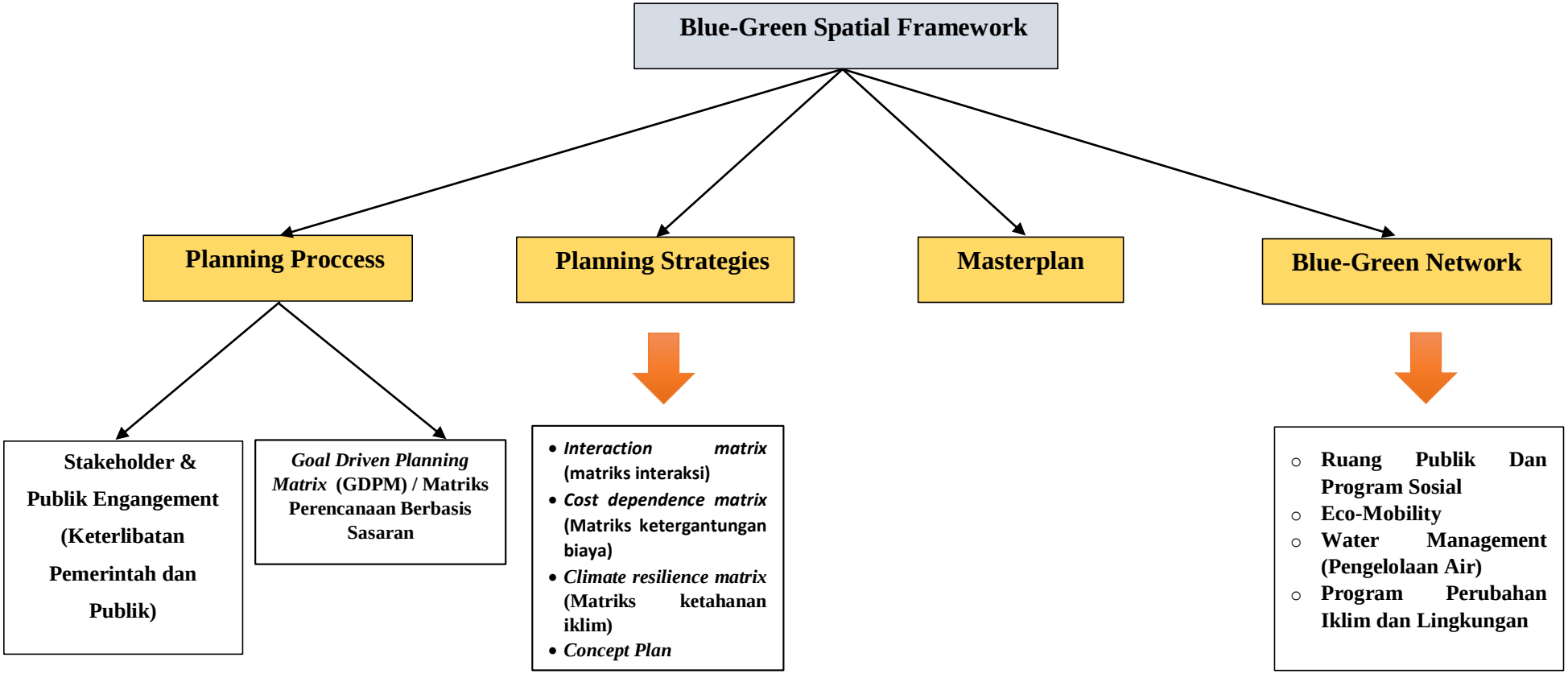
Blue-Green Spatial Framework
Planning Proccess
Planning Strategies
Masterplan
Blue-Green Network
Stakeholder & Publik Engangement (Keterlibatan Pemerintah dan Publik)
Goal Driven Planning Matrix (GDPM) / Matriks Perencanaan Berbasis Sasaran
Interaction matrix (matriks interaksi)
Cost dependence matrix (Matriks ketergantungan biaya)
Climate resilience matrix (Matriks ketahanan iklim)
Concept Plan
Ruang Publik Dan Program Sosial
Eco-Mobility
Water Management (Pengelolaan Air)
Program Perubahan Iklim dan Lingkungan

Berdasarkan diagram diatas, Konsep BG ini memiliki kerangka atau yang disebut dengan Blue-Green Spatial Framework, dimana terdapat 4 unsur/tahapan yaitu Planning Proccess, Planning Strategis, Masterplan, dan Blue-Green Network. Pada tahapan unsur *Planning Proccess* (1)/ Proses perencanaan, adanya keterlibatan stakeholder (pemerintah) dalam mengontrol inisiatif pembangunan dan sumberdaya dalam pengambilan keputusan Pelibatan masyarakat secara langsung dalam perencanaan bertujuan untuk memperjelas apa yang dikehendaki oleh masyarakat, memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, serta meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat (Retno Setiawati, Hayati Sari hasibuan, 2020). Pada tahap selanjutnya dalam *Planning Strategies* (2) sebagai alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, contohnya sebuah Concept Plan, bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja fisk pembangunan lahan seperti pembangunan kota baru dan perindustrian serta panduan implementasi utilitas dan infrastruktur publik, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Kemudian Concept Plan tersebut dimasukkan dalam Masterplan (3) dengan menunjukkan konsep pembangunan keseluruhan yang mencakup desain perkotaan, lanskap, infrastruktur, penyediaan layanan, sirkulasi, penggunaan lahan sekarang dan masa depan dan bentuk bangunannya (Shila at Sawangan, 2018). Secara singkatnya fungsi masterplan yaitu sebagai rumusan perencanaan pembangunan.

Terakhir, dalam mewujudkan dari 3 unsur sebelumnya perlu sebuah alat/pendekatan untuk mewujudkannya yaitu ‘Blue-Green Network Planning’ merupakan sebuah perencanaan adaptasi berbasis ekosistem, strategi pembangunan rendah emisi dan struktur buatan manusia, dengan beberapa pendekatan terhadap ruang publik dan program sosial, eco-mobility, water management (pengelolaan air), program perubahan iklim dan lingkungan. Dalam hal ini dibutuhkan jaringan yang saling berhubungan dari komponen lanskap alam dan desain atau lebih dikenal dengan Blue-Green Infrastructre (BGI), merupakan sebuah konsep pembangunan ruang kota yang mampu melengkapi konsep pe rencanaan kota dengan

memperhatikan komponen hijau (tanaman atau pepohonan) dan biru (perairan) sebagai dasar untuk perencanaan tata ruang kota yang berkelanjutan dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta upaya adaptasi menghadapi perubahan iklim global. Secara singkatnya, BGI ini merupakan sebuah alat untuk mencapai atau mewujudkan dari Konsep Perencanaan (Blue-Green Network Planning).

Dari hasil analisa, peneliti merumuskan indicator/muatan dari Konsep Blue-Green, dapat dilihat pada **Tabel 4.3** dengan menerapkannya ke dalam Rencana Tata Ruang. Menurut Budiaharjo dalam (Mungkasa, 2014), rencana tata ruang adalah suatu bentuk kebijakan publik yang dapat mempengaruhi keberlangsungan proses pembangunan berkelanjutan. Dalam penerapan indicator atau muatan Konsep BG dalam Rencata Tata Ruang Kota Banjarmasin, hanya beberapa indicator yang diterapkan khususnya dalam dokumen RPJP, RPJMD, dan RTRW secara umum, dikarenakan Kota Banjarmasin belum memiliki dokumen RDTR, RTBL, dan Masterplan. Menurut (Puchol-salort *et al.*, 2021), Konsep Blue-Green paling efektif diterapkan pada skala Urban Design atau perancangan kota dengan penerapan program Blue-Green yang lebih kearah implikasi di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, pentingnya dokumen RDTR berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang yang diatur RTRW, serta menjadi acuan dalam penyusunan RTBL guna mewujudkan tata bangunan dan lingkungan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

5.2 Saran

Adapun saran peneliti dengan judul 'Penerapan Konsep Blue-Green Dalam Perwujudan Kota Yang Berkelanjutan-Studi Kasus Kota Banjarmasin' yaitu :

1. Melihat dari hasil analisis, indikator konsep BG yang lebih mengarah kepada Urban Design/penerapan program konsep BG yang lebih kearah implikasi di lingkungan perkotaan, maka pentingnya suatu kota membuat dokumen RTDR, RTBL, dan Masterplan. Hal ini juga sudah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang dalam bab VI pasal 14 bahwa perencanaan tata ruang menghasilkan rencana umum dan rinci tata

ruang. Apabila suatu kota sudah memiliki dokumen tersebut maka tinjauan terhadap Konsep Blue-Green dapat dilaksanakan lebih mendalam.

2. Penelitian tentang Konsep Blue-Green ini diharapkan nantinya lebih dikembangkan dan diteliti lebih dalam sehingga dapat menjadi pedoman untuk diterapkan dalam Rencana Tata Ruang.
3. Penelitian ini diharapkan nantinya mungkin bisa jadi guidline singkat untukpenerapan Konsep Blue-Green di Indonesia